

BAB 2

STRUKTUR EKONOMI DEPENDENSI ANTARA OKINAWA DAN JEPANG

Sepanjang sejarah Okinawa modern, struktur politik dan ekonominya selalu dikendalikan oleh dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Jepang. Secara fundamental, kendala-kendala struktural yang menekan Okinawa saat ini dibentuk oleh relasi kuasa antara Okinawa dan Amerika Serikat dengan basis militer (基地) di satu sisi, dan antara Okinawa dan pemerintah Jepang dengan proyek-proyek pekerjaan umum (公共工事) dan industri pariwisata (観光産業), di sisi yang lain (Sri Ayu Wulansari 2008: 1).

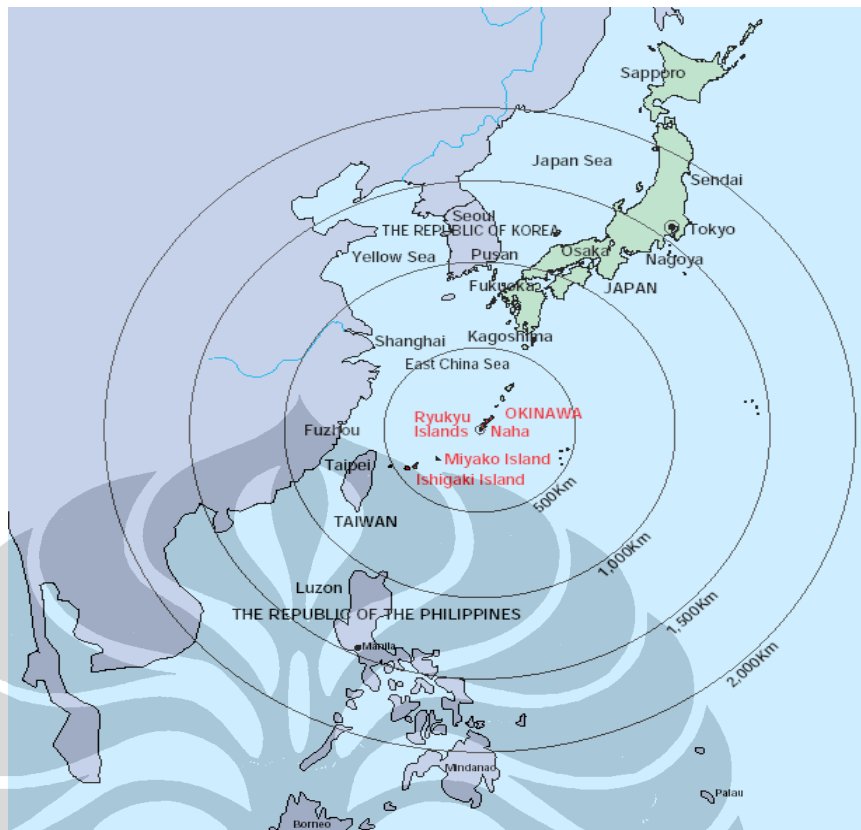
Struktur politik dan ekonomi di Okinawa, yang terbentuk dari relasi kuasa antara Jepang dan Amerika Serikat (*Tripartite Political Economy*) telah menghasilkan satu bentuk Struktur Ekonomi Dependensi antara Okinawa dan Jepang yang terikat Perjanjian Kerjasama Keamanan Luar Negeri dengan Amerika Serikat. Struktur ini membuat perekonomian Okinawa menjadi stagnan, tidak berkembang, dan tergantung kepada subsidi dari pemerintah pusat Jepang (補助金・政府支出) dan pendapatan dari basis militer Amerika Serikat (米軍基地関係収入).

Lalu, diantara propinsi-propinsi lainnya di Jepang, mengapa hanya Okinawa yang masih mengalami relasi kuasa antara Jepang dan Amerika Serikat, padahal Okinawa sudah lepas dari masa pendudukan Amerika dan telah kembali ke pangkuan Jepang sejak tahun 1972. Hal ini bisa dijelaskan apabila kita melihat sejarah Okinawa dari sebuah kerajaan bernama Ryukyu yang mandiri hingga kerajaan Ryukyu tersebut menjadi salah satu propinsi di Jepang, bernama Okinawa, dan mengalami ketergantungan ekonomi terhadap subsidi dari pemerintah pusat Jepang dalam hal proyek konstruksi umum (公共工事) dan industri pariwisata (観光産業), serta pendapatan dari basis militer Amerika Serikat (米軍基地関係収入) di Okinawa.

2.1 Latar Belakang Historis

Struktur ekonomi dan politik Okinawa sudah mulai dikontrol oleh Jepang pada masa sebelum Perang Dunia kedua. Saat itu, Okinawa diduduki oleh Satsuma, yaitu salah satu negara bagian di Jepang pada masa Toyotomi Hideyoshi tahun 1609 (*Kodansha Encyclopedy of Japan 1983: 86*). Sebelum Okinawa ditaklukan oleh Satsuma, Okinawa yang dahulu bernama Kerajaan Ryukyu merupakan negara kerajaan yang merdeka. Pada masa kerajaan itu, Okinawa sudah terkenal di kawasan Asia Tenggara dan mempunyai hubungan dagang dengan Jepang, Taiwan, Korea, Siam (Muangthai), Luzon (Filiphina), Malaka dan sebagian kerajaan di Indonesia, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit (*Wazna Zainal 1995: 2*). Walaupun Okinawa tidak mempunyai sumber daya alam yang melimpah untuk diperdagangkan, namun, dengan letak geografis yang strategis, perekonomian dan perdagangan di Kerajaan Ryukyu bisa berkembang pesat, karena kepulauan Ryukyu (琉球列島) menjadi pelabuhan perdagangan antar negara yang sangat ramai, setara dengan pelabuhan internasional Singapura pada masa kini.

Gambar 1: Peta Okinawa di Asia



Sumber: Okinawa Prefecture Government, Military Base Affairs Division 2004

“U.S. Military Issues in Okinawa” (PDF file) 3 September 2004.

[www3.pref.okinawa.jp/site/contents/attach/.../pamphlet\(English\).pdf](http://www3.pref.okinawa.jp/site/contents/attach/.../pamphlet(English).pdf)

Setelah ditaklukan oleh Satsuma, pada masa restorasi Meiji 1879, nama Ryukyu diubah menjadi Okinawa, lalu status Okinawa pun berubah menjadi salah satu propinsi di Jepang, dengan gubernurnya ditunjuk langsung dari pemerintah pusat di Tokyo (*Kodansha Encyclopedia of Japan 1985: 87*). Setelah menjadi salah satu propinsi di Jepang, perekonomian, politik, dan pemerintahan Okinawa kemudian dikendalikan oleh pemerintah pusat Jepang atau Meiji, sehingga, kerajaan Ryukyu yang dahulu mandiri, pada masa Meiji menjadi propinsi Okinawa yang tergantung pada kebijakan ekonomi dan politik Jepang.

Pada masa perang dunia kedua sekaligus perang pasifik, tahun 1945, Jepang menjadi lawan bagi sekutu (Amerika, Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan Cina). Bagi sekutu, Jepang adalah lawan yang sangat kuat, oleh karena itu, untuk menaklukan Jepang secepatnya, Sekutu dengan pimpinan militernya yaitu Jenderal Douglas McArthur dari Amerika Serikat kemudian menduduki

kepulauan Okinawa secara paksa pada bulan Juni 1945. Strategi ini dipilih karena Okinawa adalah wilayah yang paling dekat dan strategis untuk menyerang Jepang secara tepat dan cepat (*Mossadeq 2008: 3*). Hal ini terbukti, karena Jepang pada akhirnya menyerah kepada Sekutu, kurang lebih 2 bulan setelah pasukan sekutu mendarat di pulau Okinawa, dan kemudian setuju untuk menandatangani Deklarasi Potsdam pada tahun 1945. Dengan adanya Deklarasi Potsdam maka Jepang, untuk sementara, berada pada pengawasan sekutu, atau dengan kata lain, negara Jepang berada di bawah kekuasaan Sekutu (*Mossadeq 2008: 4-9*).

Pada masa pendudukan Amerika, kepulauan Okinawa menjadi pangkalan militer Amerika Serikat¹⁴. Tanpa persetujuan penduduk lokal Okinawa, Amerika Serikat mengambil lahan-lahan pertanian dan rumah-rumah penduduk untuk diubah menjadi basis-basis militer Amerika (*Dian Mutia Amsar 2003: 44*). Pada masa itu, pertanian merupakan sumber mata pencaharian ekonomi utama masyarakat Okinawa. Dengan mengambil lahan pertanian dan mengubahnya menjadi basis militer, maka militer Amerika Serikat telah menghilangkan sumber mata pencaharian penduduk, serta mengakibatkan perubahan ekonomi dan mata pencaharian utama penduduk Okinawa menjadi tergantung terhadap keberadaan basis militer Amerika Serikat (*Dian Mutia Amsar 2003: 40*). Di pangkalan militer Amerika, masyarakat Okinawa bekerja sebagai staf-staf administrasi, tenaga pemeliharaan militer, *Public Relation*, serta penyedia berbagai macam servis dan jasa bagi para personel militer Amerika Serikat (*Dian Mutia Amsar 2003: 43*).

Selama beberapa tahun pendudukan Amerika Serikat di Okinawa, maka selama itulah kondisi politik, ekonomi, dan pemerintahan Okinawa dikontrol oleh militer Amerika Serikat. Pemerintah Jepang tidak dapat berbuat banyak, karena menurut Deklarasi Potsdam, Jepang diharuskan tunduk terhadap apapun keputusan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan militer Amerika Serikat, sampai pada saat mulai diberlakukannya secara sah hasil Perjanjian Perdamaian San Fransisco yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1951 (*Mossadeq 2008: 7-9*).

Pada masa inilah, semakin banyak basis-basis militer yang dibangun oleh Amerika Serikat di Okinawa, karena letak kepulauan Okinawa dirasa sangat

¹⁴ Pangkalan atau basis militer Amerika Serikat mulai dibangun pada tahun 1949, sejak Jepang dikalahkan sekutu dalam Perang Dunia Kedua (*Dian Mutia Amsar 2003: 11*).

strategis oleh Amerika Serikat sebagai basis pertahanan untuk menghadapi serangan komunis di wilayah timur jauh, serta untuk mengawasi situasi Perang Korea, yang pecah pada tahun 1950 (Weinstein, E. Martin 1971: 50)¹⁵.

Semakin bertambahnya basis militer yang ada di Okinawa, ternyata sangat membebani masyarakat Okinawa. Berbagai macam kekerasan, tindakan kriminal, kecelakaan, dan pelecehan seksual sering terjadi di wilayah dekat pangkalan militer, yang dilakukan oleh personel-personel militer Amerika Serikat terhadap para penduduk lokal Okinawa (Dian Mutia Amsar 2003: 44). Hal ini kemudian membuat masyarakat Okinawa marah dan menuntut untuk bisa kembali menjadi bagian dari negara Jepang seutuhnya.

Parlemen di Jepang merasa tuntutan itu menjadi suatu alasan untuk merebut kembali Okinawa, selain timbulnya sentimen nasional untuk membuat Okinawa bersatu dengan Jepang (Wazna Zainal 1995: 43). Dengan berbagai cara¹⁶, pemerintah Jepang berusaha untuk mengambil hati masyarakat Okinawa. Sebagai hasilnya, masyarakat Okinawa merasa bahwa kembalinya Okinawa menjadi salah satu propinsi di Jepang adalah pilihan yang tepat, dan mereka mulai melakukan aksinya untuk menuntut Jepang dan Amerika Serikat agar Okinawa kembali menjadi wilayah kesatuan negara Jepang, dengan harapan bahwa basis militer AS bisa berkurang dan hak-hak asasi manusia di Okinawa bisa ditegakkan sesuai dengan Konstitusi tahun 1947 (Sri Ayu Wulansari 2008: 7). Pada tahun 1972, akhirnya, masyarakat Okinawa kembali menjadi salah satu propinsi di Jepang, dan kejadian ini menjadi kegembiraan bagi banyak pihak (Sri Ayu Wulansari 1997: 11). Walaupun begitu, ternyata harapan masyarakat Okinawa untuk bisa terbebas dari beban basis militer Amerika Serikat belum sepenuhnya bisa terwujud, karena Jepang sebelumnya telah mempunyai Perjanjian Kerjasama

¹⁵Perang Korea yaitu perang antara Korea Utara yang berhaluan komunis dengan dibantu oleh Uni Soviet, dan Korea Selatan yang berhaluan demokratis dengan dibantu oleh Amerika Serikat (Weinstein, E. Martin 1971: 50). Perang Korea inilah yang menjadi awal dari terjadinya Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

¹⁶Berbagai cara, seperti Perundingan-perundingan yang dilakukan oleh parlemen Jepang, Pergerakan pengembalian Okinawa ke Jepang oleh gabungan aktivis Jepang dan Okinawa, serta usaha untuk meningkatkan bantuan ekonomi ke Okinawa sejak tahun 1959 merupakan cara-cara pemerintah Jepang untuk membuat Okinawa sepenuhnya kembali ke Jepang, sekaligus untuk menebus rasa bersalahnya terhadap Okinawa pada masa perang dulu (Wazna Zainal 1995: 43).

Keamanan Luar Negeri Jepang dengan Amerika Serikat¹⁷ sejak September 1951, setelah penandatanganan Perjanjian Perdamaian San Fransisco (*Watanabe Akio 1970: 17*). Sejak saat itu, Jepang mendapatkan penjagaan keamanan luar negeri dari Amerika, namun dengan konsekuensi yaitu Jepang harus menyerahkan sebagian wilayahnya untuk dijadikan pangkalan militer, dan ternyata kepulauan Okinawalah yang dipilih dan diserahkan oleh Jepang karena lokasinya yang strategis dan dianggap sebagai *minor island* (*Sri Ayu Wulansari 2008*), yaitu daerah yang dianggap sebagai minoritas atau berbeda bagi Jepang. Sampai saat ini perjanjian tersebut masih dilaksanakan oleh AS dan Jepang, dengan efek negatifnya yaitu keberadaan pangkalan militer AS di Okinawa semakin besar. Hal ini membuat masyarakat Okinawa merasa kecewa, karena mereka hanya dianggap sebagai masyarakat minoritas, di bawah struktur subordinat hubungan kerjasama Jepang dan Amerika Serikat.

Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut dan di bawah struktur subordinat antara Jepang dan AS, maka kekuasaan propinsi Okinawa dipegang oleh dua kekuatan besar tersebut, sehingga kondisi politik, ekonomi, dan pemerintahan Okinawa didominasi oleh kebijakan dari pemerintah pusat Jepang dan militer Amerika Serikat. Dominasi ini kemudian membuat perekonomian Okinawa menjadi tergantung kepada Jepang dan Amerika Serikat. Namun kenyataannya, perekonomian Okinawa cenderung tergantung kepada Jepang daripada Amerika. Ekonomi Okinawa mungkin masih bisa bertahan tanpa basis militer AS, namun kehidupan perekonomian dari propinsi yang tidak mempunyai sumber daya ekonomi yang memadai ini tidak akan bisa bertahan tanpa bantuan dan subsidi dari pemerintah Jepang. Di satu sisi, ekonomi Okinawa tergantung pada pendapatan dari basis-basis militer Amerika (*米軍基地関係収入*), dan di sisi lain, propinsi Okinawa juga tidak bisa lepas dari subsidi dan investasi pemerintah pusat Jepang (*補助金・政府支出*) dalam hal proyek pekerjaan

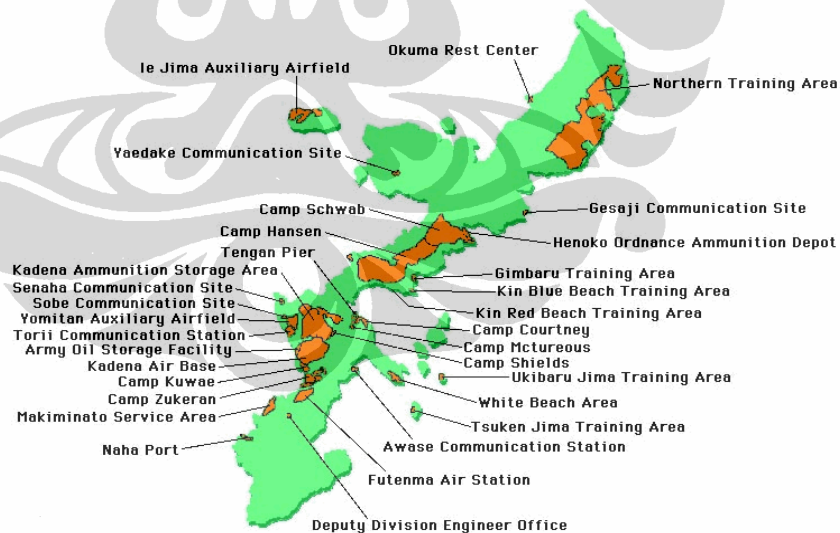
¹⁷Sejak masa Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, Perdana Menteri Jepang, Ashida, mengusulkan pada Amerika agar Amerika menjamin Jepang dari serangan Uni Soviet, karena setelah kekalahan Jepang di Perang Pasifik, militer Jepang sudah tidak berdaya lagi. Sebenarnya PM Ashida tidak menginginkan keamanan Jepang untuk terus bergantung terhadap Amerika, namun Amerika menolak, karena bila militer Jepang tidak tergantung lagi terhadap Amerika, maka kepulauan Okinawa, sebagai basis pertahanan Amerika untuk melindungi luar negeri Jepang, pun akan diambil dari Amerika (*Weinstein, E. Martin 1971: 28*)

umum (公共工事), dan industri turisme (観光産業) (Hook and Siddle 2003: 3-8).

2.2 Perekonomian Dari Basis Militer Amerika Serikat (米軍基地; *Kichi*)

Setelah masa pendudukan Amerika Serikat berakhir pada tahun 1972, dan Okinawa kembali menjadi salah satu propinsi di Jepang, basis militer Amerika Serikat (米軍基地) masih tersisa di Okinawa dan menjadi wilayah tempat basis militer terbesar di Asia. Seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 1, sekitar 74,8% fasilitas militer Amerika Serikat (米軍施設) yang ada di Jepang ditempatkan di kepulauan Okinawa, dan menempati sekitar 10,7 % wilayah pulau utama Okinawa, atau bisa dikatakan basis militer di Okinawa mengambil 82,9 % wilayah kota Kadena, 59,6 % wilayah kota Kin, 56,4% wilayah kota Chatan, dan 51,4 % wilayah kota Ginoza (Berdasarkan gambar dari *Official Website Okinawa Prefecture 2001*).

Gambar 2: Instalasi Militer Amerika Serikat di Okinawa



Sumber: Official Website, Okinawa Prefecture, Japan; Military Base Affairs Division 2001

“Outline of the U.S. Facilities and Areas” Maret 2001.

<www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp>

Basis militer Amerika Serikat yang masih tersisa di Okinawa sampai saat ini adalah poin penting dari beban struktur ekonomi ketergantungan yang menimpa masyarakat Okinawa saat ini (*Sri Ayu Wulansari 2008: 7*). Basis militer berukuran raksasa di Okinawa ini telah sangat dalam dan besar dalam mempengaruhi kondisi politik ekonomi propinsi Okinawa dan secara bertahap juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Okinawa sejak tahun 1972 (*Sri Ayu Wulansari 2008: 8*). Pengaruh sosial dari adanya raksasa basis militer di Okinawa bisa dilihat dari data-data kecelakaan, tindakan kekerasan, dan masalah kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh basis militer Amerika Serikat secara umum, dan oleh para personel militer AS secara khusus. Data ini bisa dilihat di Tabel 1, yang menunjukkan jumlah kecelakaan, tindakan kekerasan, dan masalah kerusakan lingkungan yang terjadi di Okinawa dari tahun 1999 sampai tahun 2003 (*Sri Ayu Wulansari 2008: 9*).

Tabel 1: Jumlah Kecelakaan, Tindakan Kekerasan, dan Masalah Kerusakan Lingkungan yang Disebabkan oleh Kegiatan Basis Militer Amerika Serikat di Okinawa (Sampai Tahun 2003)*

Tipe Insiden/Kecelakaan	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Kecelakaan Pesawat	6	3	1	11	7	8
Peluru nyasar, dll	0	0	0	0	0	0
Limbah minyak dan pembuangan lainnya	3	4	3	3	3	5
Kebakaran hutan	15	18	12	7	12	5
Lainnya (yang berhubungan dengan latihan militer)	11	2	2	3	4	2
Insiden dan Kecelakaan lainnya	6	5	8	11	6	8
Total	41	32	26	35	32	28

*Telah diolah kembali

Sumber: Official Website, Okinawa Prefecture, Japan; Military Base Affairs Division

“U.S.Military Issues in Okinawa” (PDF file). 3 September 2004.

Raksasa basis militer Amerika Serikat juga mempunyai dampak ekonomi yang cukup vital. Seperti yang terlihat pada Tabel 2, bahwa rakasasa basis militer AS telah menghasilkan dampak yang cukup besar bagi ekonomi lokal Okinawa.

**Tabel 2: Penghasilan Dari Basis Militer Amerika Serikat di Okinawa
(November 2008)***

	1972	1980	1985	1989	1992	1995	1999	2005
Konsumsi/Pengeluaran dari Personel Militer (100 milyar yen)	414	525	708	548	546	477	580	632
Gaji Pegawai Jepang di basis militer (100 milyar yen)	240	278	350	419	500	523	513	507
Biaya Sewa Lahan (100 milyar yen)	123	311	383	427	517	603	705	776
Total Pendapatan dari berbagai transaksi militer (100 milyar yen)	777	1,114	1,441	1,394	1,563	1,603	1,798	1,914
Ekonomi Dependensi dari Basis Militer AS (persentase diukur dari Gross Prefectural Expenditure)	15.5	7.1	6.4	4.9	4.9	4.7	5.2	5.2

*Telah diolah kembali

Sumber: Official Website, Okinawa Prefecture, Japan; Military Base Affairs Division

沖縄の米軍基地 (Okinawa no Beigun Kichi): 第5章 基地周辺対策と経済 (Dai Go Shou Kichi Shuuhun Taisaku To Keizai). 17 November 2008. <<http://www.pref.okinawa.jp/>>

Masyarakat Okinawa tidak bisa menghindari fakta bahwa perekonomian mereka juga tergantung oleh pendapatan yang bersumber dari basis militer Amerika Serikat, seperti pendapatan yang berasal dari gaji pegawai Jepang (米軍基地関係収入), yang bekerja di pangkalan militer itu, uang sewa (軍用地料) yang dibayar oleh militer AS kepada 33.309 pemilik lahan (地主) tempat pangkalan militer itu berdiri, dan pendapatan yang berasal dari aktivitas konsumsi yang dilakukan oleh para personel militer AS yang menggunakan jasa atau servis dari masyarakat Okinawa (Sri Ayu Wulansari 2008: 12-13). Pendapatan yang diperoleh dari basis militer ini tidak bisa dipungkiri telah mendukung perekonomian propinsi Okinawa. Apabila dilihat dari GPP (*Gross Prefectural Product*; 県内総生産), dari tahun 1972, sekitar 15,5% dari GPP Okinawa telah disumbangkan oleh basis-basis militer Amerika kepada propinsi Okinawa. Namun, seberapapun vitalnya sumbangan ekonomi dari adanya basis militer AS di Okinawa, ternyata pada tahun 2005, GPP propinsi Okinawa yang berasal dari basis militer AS terus menerus berkurang menjadi 5,2%¹⁸ (Sri Ayu Wulansari 2008: 13-14).

Hal tersebut membuktikan bahwa perekonomian Okinawa tidak selamanya tergantung oleh pendapatan dari basis militer Amerika Serikat. Walaupun begitu, apabila pendapatan yang berasal dari basis militer berkurang, maka akan berakibat juga pada pengurangan kesempatan kerja para penduduk lokal Okinawa. Ternyata, bila melihat data jumlah pekerja lokal yang bekerja di basis militer AS di Okinawa, maka akan terlihat bahwa terdapat pengurangan tenaga kerja dari tahun 1972, basis militer AS telah mempekerjakan 18.118 tenaga kerja, terus menerus berkurang sampai pada tahun 2005, yaitu hanya sekitar 8.928 tenaga kerja yang bekerja di basis militer Amerika Serikat di Okinawa (*Official Website Okinawa Prefecture 2008*). Namun demikian, basis militer AS di Okinawa tetap menyediakan kesempatan kerja bagi para penduduk lokal Okinawa, dan tetap menjadi favorit para pencari kerja, karena gajinya yang lumayan besar (Negishi 2002).

¹⁸Tercatat bahwa pada tahun 2005, basis militer Amerika Serikat telah menyumbang sekitar 200,6 miliar yen, kurang dari setengah jumlah yang telah disumbangkan oleh industri pariwisata di Okinawa (*Official Website Okinawa Prefecture 2008*)

Tabel 3: Jumlah Para Pekerja di Basis Militer Amerika Serikat di Okinawa*

Tahun	1972	1980	1985	1990	1995	2000	2005
Jumlah Pekerja di Basis Militer AS	18,118	7,196	7,467	7,717	8,258	8,491	8,928

*Telah diolah kembali

Sumber: Official Website, Okinawa Prefecture, Jepang, November 2008; Military Base Affairs Division

沖縄の米軍基地 (Okinawa no Beigun Kichi): 第5章 基地周辺対策と経済 (Dai Go Shou Kichi Shuuhun Taisaku To Keizai). 17 November 2008. <<http://www.pref.okinawa.jp/>>

Bagi sebagian masyarakat Okinawa yang sangat tergantung oleh eksistensi basis militer AS, seperti para pemilik lahan (地主) dan para pekerja lokal yang bekerja di basis militer (軍雇用者) tersebut, ternyata eksistensi basis militer Amerika Serikat (米軍基地) di Okinawa mempunyai dampak positif bagi perekonomian mereka, selain juga mempunyai dampak negatif dalam bidang sosial, keamanan dan lingkungan Okinawa.

2.3 Perekonomian Dari Proyek Pekerjaan Umum (公共工事; *Koukyou Kouji*)

Salah satu dari struktur ketergantungan ekonomi Okinawa terhadap Amerika Serikat dan Jepang, berasal dari Proyek Pekerjaan atau Konstruksi Umum (公共工事), yang merupakan program subsidi pemerintah pusat Jepang untuk memajukan perekonomian propinsi Okinawa (Sri Ayu Wulansari 2008: 14). Namun, dibalik tujuan itu, terdapat niat lain dari pemerintah Jepang yaitu untuk membantu pengembangan eksistensi basis militer Amerika Serikat di Okinawa.

Selain proyek untuk mengembangkan dan membangun basis militer AS di Okinawa, program ini juga dibuat dengan tujuan untuk membangun fasilitas bisnis, rekreasi, pendidikan, transportasi, pelabuhan, dan bandar udara di Okinawa. Proyek ini didekasikan untuk menjalankan “Okinawa Fukko Kaihatsu

Keikaku” (沖縄復興開発計画) atau program pembangunan ekonomi propinsi Okinawa untuk menjadikan Okinawa sebagai kota kosmopolitan yang modern (Dian Mutia Amsar 2003: 45-46). Namun demikian, selama basis-basis militer masih terdapat di Okinawa, maka kota kosmopolitan yang diidamkan pun kurang bisa terwujud, karena wilayah yang seharusnya menjadi lahan potensial untuk kegiatan industri, sistem transportasinya terganggu oleh hadirnya basis militer Amerika Serikat (米軍基地) yang mengambil sebagian besar wilayah perkotaan (Dian Mutia Amsar 2003: 45-47).

Gambar 3: Basis Militer Amerika Serikat di Okinawa Menghalangi Infrastruktur Industri dan Sistem Transportasi



▲ Area Makiminato (salah satu basis militer AS di Okinawa) dibangun di sepanjang Rute Nasional 58, sebuah jalan raya arteri (jantung kota), dan menduduki area yang penting untuk pembangunan propinsi

Sumber: Official Website Okinawa Prefecture, Japan 2001; Military Base Affairs Division “U.S. Military Impact on the Local Community: Impact on the Local Development” Maret 2001. <www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp>

Dengan sistem transportasi yang terhalangi oleh adanya basis militer tersebut, maka jalur aktivitas perdagangan pun menjadi terhambat. Hal ini sama saja memutus jalur bisnis dan menghalangi terciptanya kota kosmopolitan

Okinawa yang telah menjadi program pembangunan daerah dari pemerintah pusat Jepang.

Dari data yang ada disebutkan bahwa proyek pekerjaan umum (公共工事) ini telah menyumbang sekitar 13,9% dari perekonomian Okinawa atau 10,3% dari perekonomian nasional Jepang pada tahun 1995. Pada tahun 1996, seluruh bisnis konstruksi yang dilakukan di Okinawa, sekitar 50,3% dikuasai oleh proyek pekerjaan umum subsidi dari pemerintah pusat Jepang (*Okinawa Ken Kikaku Kaihatsubu Kikaku Chousei Shitsu 1998: 43-4*). Secara kumulatif, subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat Jepang untuk proyek pekerjaan umum ini selama kurun waktu 25 tahun, dari tahun 1972 sampai 1996 adalah sebesar 5 triliun yen (50 miliar dolar pada masa itu), dan dari propinsi-propinsi Jepang lainnya, propinsi Okinawalah yang paling banyak disubsidi dalam hal proyek pembangunan daerah. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa kemajuan pembangunan daerah propinsi Okinawa sangat tergantung dari subsidi pemerintah pusat Jepang. Walaupun begitu, tetap saja propinsi Okinawa masih menjadi propinsi termiskin di Jepang, karena perekonomian mereka tidak bisa mandiri dan mengandalkan subsidi pemerintah pusat Jepang yang bersifat sementara, seperti proyek pekerjaan umum (公共工事) ini¹⁹.

2.4 Perekonomian dari Industri Turisme atau Pariwisata (観光; *Kankou*)

Perkembangan Industri Turisme atau Pariwisata (観光産業) di Okinawa juga mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Okinawa. Semakin berkembangnya Industri Pariwisata di Okinawa, peran ekonomi basis militer Amerika Serikat di Okinawa semakin berkurang. Masyarakat Okinawa menyebutnya sebagai perubahan ekonomi dari ekonomi (bergantung pada) basis militer menjadi ekonomi (berbasis) servis atau pelayanan jasa (*Sri Ayu Wulansari 2008: 16*).

¹⁹Walaupun dari program proyek konstruksi umum (公共工事) ini telah dibangun berbagai macam fasilitas untuk mengembangkan pembangunan dan perekonomian di Okinawa, namun perekonomian Okinawa tidak akan bisa berkembang dan mandiri apabila masih terdapat basis-basis militer Amerika Serikat (米軍基地) yang menghalangi jalur transportasi dan merusak tata ruang kota dan industri.

Industri Pariwisata (*観光産業*) di Okinawa adalah murni sebagai hasil dari masyarakat Jepang yang semakin makmur dan ingin mencari tujuan wisata yang eksotis di luar pulau Jepang (*Sri Ayu Wulansari 2008: 16*). Kepulauan Okinawa dipilih sebagai tujuan wisata yang eksotis favorit masyarakat Jepang, karena lokasinya yang sangat dekat dengan pulau Jepang, dan bahasa yang tidak terlalu berbeda dengan bahasa Jepang.

Pada masa kembalinya Okinawa ke Jepang tahun 1975, industri pariwisata (*観光産業*) Okinawa memperlihatkan pertumbuhan yang dramatis, ketika jumlah turis atau wisatawan yang mengunjungi Okinawa menunjukkan angka 400.000. Jumlah tersebut terus meningkat dan mencapai jumlah 5,5 juta wisatawan yang mengunjungi Okinawa pada tahun 2005 (*Sogano 2006: 23*). Dari jumlah yang sangat banyak itu, sebagian besarnya merupakan wisatawan dari pulau (*mainland*) Jepang (*Okinawa Ken Kikaku Kaihatsubu Kikaku Chousei Shitsu 1998: 45, 47*).

Tabel 4: Penghasilan Masyarakat Okinawa dari Basis Militer AS, Industri Pariwisata, dan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Data November 2008)*

Tahun	2001	2002	2003	2004	2005
Pendapatan dari Basis Militer AS	200,1 milyar yen (5,3%)	202,7 milyar yen (5,4%)	211,3 milyar yen (5,6%)	211,2 milyar yen (5,6%)	200,6 milyar yen (5,2%)
Pendapatan dari Industri Pariwisata	342 milyar yen (9,1%)	348,3 milyar yen (9,3%)	377,3 milyar yen (10,0%)	369,4 milyar yen (9,8%)	407,1 milyar yen (10,5%)
Pendapatan dari Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan lain-lain	50,3 milyar yen (1,3%)	41,3 milyar yen (1,1%)	49,2 milyar yen (1,3%)	52,9 milyar yen (1,4%)	54,1 milyar yen (1,4%)

Pendapatan Seluruh Warga Propinsi Okinawa	3,77 triliun yen	3,74 triliun yen	3,77 triliun yen	3,78 triliun yen	3,86 triliun yen
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

*Telah diolah kembali

Sumber: Official Website, Okinawa Prefecture, Jepang

沖縄の米軍基地 (Okinawa no Beigun Kichi): 第5章 基地周辺対策と経済(Dai Go Shou Kichi Shuuhun Taisaku To Keizai). 17 November 2008. <<http://www.pref.okinawa.jp/>>

Pemerintah Jepang yang melihat kondisi ini, sepertinya melihat kesempatan bagus untuk bisa meningkatkan perekonomian Okinawa melalui industri pariwisata ini. Seperti yang telah diketahui, bahwa sejak Okinawa kembali ke pangkuan Jepang, pemerintah Jepang berupaya meningkatkan perekonomian Okinawa melalui program “Okinawa Fukko Kaihatsu Keikaku” (沖縄復興開発計画) program pembangunan kembali ekonomi Okinawa, agar Okinawa tidak lagi bergantung kepada ekonomi dari basis militer Amerika di Okinawa (Takahama, para. 1).

Pada akhirnya, pemerintah Jepang berusaha mengajak para penanam modal dari *mainland* Jepang (本土) untuk menanamkan modalnya di industri pariwisata Okinawa, untuk membantu meningkatkan perekonomian propinsi Okinawa. Selain itu, pemerintah Jepang juga berusaha meningkatkan promosi Okinawa sebagai tempat tujuan pariwisata yang eksotis kepada masyarakat Jepang.

Sampai saat ini pun, industri pariwisata di Okinawa mengalami perkembangan yang pesat dan telah menjadi pengharapan bagi perekonomian masyarakat Okinawa. Industri pariwisata ini telah menghasilkan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Okinawa, yaitu sebagai staf hotel atau resor, *tour guide*, dan sebagai pekerja di industri hiburan maupun industri pangan agrikultur yang menunjang perkembangan pariwisata di Okinawa.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri pariwisata di Okinawa, ternyata masih ada pro dan kontra terhadap eksisnya industri ini. Menurut mereka

yang kontra terhadap industri ini, menyebutkan bahwa peningkatan industri pariwisata juga berakibat peningkatan terhadap kerusakan lingkungan, terutama lingkungan perairan Okinawa. Pembangunan hotel dan resor dekat pantai yang tidak terencana dengan baik, akhir-akhir ini, telah diduga sebagai penyebab kerusakan terumbu-terumbu karang setempat (*Sri Ayu Wulansari 2008: 16*). Masyarakat yang kontra ini menilai industri pariwisata tidak terlalu bernilai ekonomi tinggi, karena hanya bersifat sementara atau tidak berdampak ekonomi jangka panjang. Selain itu, peningkatan industri pariwisata di Okinawa bukan merupakan hasil murni modal para penduduk lokal Okinawa, melainkan merupakan salah satu hasil bantuan dari pemerintah pusat Jepang melalui tangan para penanam modal dan wisatawan yang berasal dari *mainland* Jepang (*本土*). Sampai saat ini, sekitar 80% hotel-hotel dan resor-resor di Okinawa adalah milik investor dari *mainland* Jepang (*Okinawa Roudou Keizai 1992*). Apabila pemerintah Jepang tidak membantu, maka perkembangan industri pariwisata di Okinawa tidak akan sepesat ini, karena secara modal, propinsi Okinawa belum bisa mengembangkan industri ini secara mandiri. Maka dari itu, hal ini sama saja seperti membuat perekonomian Okinawa kembali bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat Jepang.

Apabila perekonomian Okinawa masih tergantung kepada bantuan subsidi dan investasi dari pemerintah Jepang, maka akan semakin besar kekuasaan atau dominasi pemerintah pusat Jepang, “bekerja sama” dengan militer Amerika Serikat, terhadap Okinawa sebagai propinsi periferinya.

2.5 Kesimpulan

Okinawa yang tidak mempunyai sumber daya ekonomi yang mencukupi, mau tidak mau menerima bantuan ekonomi berupa subsidi dan investasi dari pemerintah pusat Jepang berupa proyek konstruksi umum (*公共工事*) senilai 276,8 milyar yen (*Okinawa Ken Kikakubu Toukeika 2004*) dan industri pariwisata (*観光産業*) yang sekarang menjadi pengharapan bagi perekonomian propinsi karena telah menghasilkan sekitar 407,1 miliar yen pada tahun 2005 (*Official Website Okinawa Prefecture 2008*). Namun, dengan adanya subsidi ini, maka perekonomian Okinawa semakin tergantung kepada pemerintah pusat Jepang

(日本の中央政府). Selain itu, perekonomian propinsi Okinawa juga tergantung kepada pendapatan dari basis militer Amerika Serikat (米軍基地関係収入) yang telah menyumbang 200,6 miliar yen pada tahun 2005, termasuk uang sewa²⁰ (軍用地料) kepada 33.309 *landowners* (地主) di Okinawa (*Official Website Okinawa Prefecture 2008*). Ketergantungan ekonomi ini membuat propinsi Okinawa menjadi inferior di bawah relasi kuasa antara Jepang dan Amerika Serikat.

Amerika Serikat yang menginginkan untuk tetap mempertahankan kekuasaannya di Asia, berusaha menggandeng Jepang sebagai sekutunya di Asia Timor. Untuk kepentingan politik itulah, maka Amerika membuat basis militer yang besar di Okinawa dan menaruh sebagian besar pasukannya disana.

Jepang yang sudah terikat perjanjian kerjasama keamanan luar negeri dengan Amerika, mau tidak mau harus menyerahkan sebagian wilayahnya untuk menempatkan para pasukan Amerika Serikat tersebut. Sebagai imbalannya, wilayah Jepang akan dijaga dan didukung oleh militer AS, serta pemerintah Jepang tidak perlu mengeluarkan dana untuk membiayai tentaranya sendiri. Melihat keuntungan ini, maka Jepang menyerahkan Okinawa kepada Amerika Serikat untuk membangun raksasa basis militernya, karena Jepang menganggap Okinawa merupakan *minor island* atau pulau yang terpisah dari Jepang dan bukan merupakan bagian integral dari negara Jepang. Selain itu, Okinawa juga dipilih oleh Jepang dan Amerika Serikat, karena lokasinya yang strategis untuk mengawasi kondisi negara-negara tetangga.

Namun, masyarakat Okinawa tidak mau dibebani begitu banyaknya basis militer Amerika Serikat di wilayahnya. Bagi masyarakat Okinawa, basis militer AS tersebut sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman, serta membatasi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Okinawa. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Okinawa bersikeras menolak keberadaan raksasa basis militer AS dan berpendapat bahwa basis militer AS tersebut harus dihilangkan dari wilayah kepulauan Okinawa ini.

²⁰ Uang sewa lahan tempat berdirinya basis militer ini merupakan tanggung jawab pemerintah Jepang. Dari laporan US Forces Japan Okinawa Area Field Office pada Januari 2005, pemerintah Jepang bertanggung jawab atas 70% dari total pengeluaran basis militer AS di Okinawa (Johnston 2006)

Pemerintah Jepang yang mengetahui hal tersebut akan mengganggu hubungan kerjasamanya dengan Amerika, berusaha membantu perekonomian Okinawa dengan subsidi dan investasi dalam hal proyek pekerjaan umum (公共工事) dan industri pariwisata (観光産業). Bila melihat luarnya, maka subsidi ini sangat menjanjikan bagi perkembangan perekonomian di Okinawa, namun apabila dilihat dari dalam, maka subsidi ini ternyata mempunyai kompensasi yang sangat besar, yaitu masyarakat Okinawa harus menerima keberadaan basis militer AS yang sangat banyak itu.

Pada akhirnya, perekonomian propinsi Okinawa tidak bisa lepas dari keberadaan raksasa basis militer Amerika Serikat (米軍基地) di wilayahnya, dan juga tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap subsidi dan investasi (補助金・政府支出) yang bersifat sementara itu, dari pemerintah Jepang.

